

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nurul Fitri, 2013, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah", *Accounting Analysis Journal* Vol. 2. No 3.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Broderick, Anne J, 1998, "Role theory, role management and service performance," *Jurnal The Journal of Services Marketing*, Vol. 12. No.5.
- Christiani, Charis, 2012, "Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Gemuhblanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal", *Journal Serat Acitya* Vol.1. No.9.
- Davis, J.H., Schoorman, F.D., dan Donaldson, L. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management review*", *Jurnal Management* Vol. 22. No.1.
- Dewi, Indah Mustika, 2014, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)", *Jurnal Ekonomi*, Vol.3, No.2, Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2013, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartikasari, Dewi, 2012, "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)", *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kharimah, Firda, and Amries Rusli Tanjung, 2016 "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dprd Tentang Anggaran, Pemahaman Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Dprd Pemerintahan Provinsi Riau)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* Vol.4, No.1.

- Novatiani, R Ait dan Nurmalita Lestari, 2014, “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota DPRD Kota Bandung” *Jurnal Akuntansi Publik*, Vol.6. No.3.
- Manginte, S.Y., E. G, Sukoharsono, dan E.Saraswati, 2015. “Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pegawai Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol.2. No.2.
- Mayasari, Rosalina Pebrica, 2012, “Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating” *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*.Palembang: Universitas Tridinanti Palembang. Vol.5. No.1.
- Oktasari, Rosy, and Ak Atwal Arifin, 2016, “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Karanganyar” Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Fairness*, Vo.3, No.1.
- Panuntun, Amin Bagus, 2012, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Klaten Jawa Tengah). Universitas Muhammadiyah Surakarta”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.2. No.4.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013 “Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. Universitas Negeri Semarang. *UNNES Journal*, Vol.12, No.1.
- Rubin, Irene, 1996, “Budgetting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s”, *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Vol. 112. No. 132.
- Sastroatmodjo,Sudijono, 2012, *Perilaku politik* Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, *Jurnal Politik* Vol.21. No.3.
- Sekretariat Negara. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Sekretariat Negara. 2004. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sekretariat Negara. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Sekretariat Negara. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Sekretariat Negara. 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Shofia Yunus Manginte, Eko Ganis Sukoharsono, dan Erwin Saraswati, 2015, Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol.18, No.1.
- Sri Murni dan Banu Witono, 2014, "Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah", *Jurnal Perspektif*, Vol. 9. No.2.
- Sugiyono, 2014, *Psikologi Sosial*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, *Journal Psikologi Sosial*, Vol.5, No.1.
- Tribun News. 2013. Korupsi Pembangunan Gedung Pasar Tejoagung Metro: <http://www.tribunnews.com>. Diakses tanggal 8 November 2013.
- Tribun News. 2012. Korupsi Pembangunan Infrastruktur Dinas PU: <http://www.tribunnews.com>. Diakses tanggal 8 Desember 2012.
- Utami, Kurnia, and Efrizal Syofyan, 2013, "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik." *Journal Wahana Riset Akuntansi*, Vol.3. No.1.
- Walgito, Bimo 2013, *Psikologi Sosial (suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wibowo, Sigit Arie, 2012, "Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, dan Political Culture terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.13. No.1.
- Yuhertiana, Indrawati. 2012, "Principal-Agent Theory Dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.5. No.2.

Yuliusman,2012, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan DPRD Tentang Anggaran Dengan Pengawasan APBD (Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi Jambi)”, Jurnal Partisipasi Masyarakat, Vol.14. No.2